BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan penulis terhadap proses pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, penulis dapat menguraikan:

1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pengamanan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti membuat BAST, menatausahakan BPKB dan fotokopi STNK, dan selalu taat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti menyusun rencana

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah setahun sebelumnya, kemudian mencuci mobil secara rutin yang dilakukan oleh penanggung jawab, dan mengecek kelayakan ban, kelayakan rem, mengganti oli, aki, air radiator, dan servis berkala lainnya yang dibantu oleh pihak lain. Namun, ada hal yang masih perlu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam pemeliharaan Barang Milik Daerah, yaitu melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan untuk:

1. Melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan setiap Barang Milik Daerah yang dimiliki, karena dengan melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan akan memudahkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam hal mengevaluasi anggaran pemeliharaan yang termasuk prioritas. Dengan adanya kartu tersebut, pengurus barang/pengurus barang pembantu akan mengetahui barang yang harus dilakukan pemeliharaan terlebih dahulu dan barang yang bisa ditunda. Dengan melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan juga akan mempermudah segala urusan administrasi apabila diminta pertanggungjawaban.